

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal di Kota Surabaya

Febita Agustin Nurhalimah¹, Ignatia Martha Hendrati², Kiki Asmara³

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

³ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

17011010041@student.upnjatim.ac.id, ignatia.hendrati.ep@upnjatim.ac.id, kikiasmara.ep@upnjatim.ac.id

Abstract

Regional development is carried out in an integrated and prolonged manner based on priorities from the existence of regional needs with a base and national level development targets that have been inaugurated through long-term and short-term development. Human development is one of the indicators in determining regional progress so that it is necessary to take steps that are planned and implemented by the regional government as an effort to increase regional development which is expected to be able to improve the welfare of the community. The objectives of this research are: to determine and analyze the impact of local own revenue on the Human Development Index of Surabaya, determine and analyze the impact of balanced funds on the Human Development Index of Surabaya, determine and analyze local's own revenue on the Human Development Index through capital expenditure in Surabaya, and to determine and analyze the balancing fund on the Human Development Index through capital expenditure in the city of Surabaya. The population used in this study is the Human Development Index data and the Surabaya City Government Financial Report. Determination of the number of samples using the Purposive Sampling method. The sample of this study is the human development index data with a new method that the United Nations for Development Program (UNDP) inaugurated in 2010 and the budget realization report in the City of Surabaya in 2010-2019. This study uses regression analysis with intervening variables for analysis. The research results show that local own revenue has a direct impact on the human development index, while the balance fund does not directly affect the human development index, while the local own revenue and the balance fund have no indirect relationship with the human development index through capital expenditure

Keywords: *Local Own Revenue, Balance Fund, Capital Expenditure, Human Development Index*

Abstrak

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan terpadu serta berkepanjangan bersumber pada prioritas dari terdapatnya kebutuhan daerah dengan pangkal serta target pembangunan tingkat nasional yang sudah diresmikan melalui pembangunan jangka panjang serta jangka pendek. Pembangunan manusia merupakan salah indikator dalam menentukan kemajuan daerah sehingga perlu adanya langkah-langkah yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya, Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya, Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal di Kota Surabaya, Untuk mengetahui dan menganalisis dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal di Kota Surabaya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah data Indeks Pembangunan Manusia dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Penentuan jumlah sampelnya menggunakan metode Purposive Sampling. Sampel dari penelitian ini ialah data indeks pembangunan manusia dengan metode baru yang *United Nations for Development Programme* (UNDP) resmikan pada tahun 2010 dan laporan realisasi anggaran di Kota Surabaya Tahun 2010- 2019. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi dengan variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara langsung sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia, dan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak memiliki hubungan secara tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia

© 2021 EKOBISTEK

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional mempunyai ikatan yang sangat erat terhadap pembangunan wilayah, dikarenakan pembangunan ekonomi nasional bergantung pada pembangunan daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan dengan terpadu serta berkepanjangan bersumber pada prioritas dari terdapatnya kebutuhan daerah dengan pangkal serta target pembangunan tingkat nasional yang sudah diresmikan melalui pembangunan jangka panjang serta jangka pendek. Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari struktur ekonomi, perkembangan ekonomi, urbanisasi, angka tabungan, indeks kualitas hidup serta yang terutama adalah keberhasilan pembangunan manusia disebabkan negera dikatakan maju bila yang dijadikan tolak ukurnya adalah indeks pembangunan manusia (Oktavia, Soelistyo, & Arifin, 2018)

Pembangunan manusia pada dasarnya menekankan terjaminnya kehidupan yang layak dan bermakna sebagai suatu proses perluasan pilihan yang beragam kepada masyarakat dengan mengutamakan pemberdayaan kemampuan dasar sumber daya manusia sehingga mampu berpartisipasi penuh di segala bidang pembangunan. Unsur-unsur pembangunan manusia menjelaskan bahwa target yang ingin dicapai, yaitu ekonomi, kesehatan dan pengetahuan (Riviando, Agustin, & Halmawati, 2019)

Salah satu indikator dalam menentukan kemajuan daerah adalah dengan pembangunan manusia sehingga perlu adanya langkah-langkah yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah diharapkan menghasilkan dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Utami & Indrajaya, 2019)

Daerah berwenang merancang kebijakan untuk menyediakan pelayanan, meningkatkan peran dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tentang otonomi daerah di Indonesia, yang memiliki landasan hukum dengan adanya undang-undang telah membawa konsekuensi tersendiri sehingga terwujudnya pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Maka, otonomi daerah dipandang mencerminkan desentralisasi yang sesungguhnya dan lebih demokratis karena daerah dapat lebih leluasa menggali potensi yang ada di daerahnya. Adanya desentralisasi mengakibatkan munculnya desentralisasi fiskal, yang merupakan wujud dari desentralisasi kewenangan pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Rinanda & Subambang, 2020)

Desentralisasi fiskal berdampak adanya hubungan yang saling berkaitan antara pembangunan

daerah dengan kemandirian daerah. Kemandirian daerah yaitu salah satu dari aspek yang mampu meningkatkan pembangunan di daerah dalam melaksanakan program pendukung pencapaian daerah, sedangkan keuangan daerah menjadi indikator penilaian tingkat keberhasilan pembangunan daerah. Maka, pemerintah daerah wajib berupaya untuk mengatur pengelolaan dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat agar mengurangi adanya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (Kustianingsih, Muslimin, & Kahar, 2018)

Alat untuk melaksanakan otonomi daerah yang bertanggungjawab ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD memiliki kedudukan vital dalam memenuhi fungsi dari pemerintah daerah, memberikan pelayanan ke masyarakat dan instrumen fiskal daerah, peran ini semakin kuat di era desentralisasi fiskal sehingga mampu memberikan gambaran yang sebenarnya ke masyarakat tentang kemampuan pemerintah dalam mengelola kinerja daerah. Pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengejar pembangunan manusia melalui pengelolaan APBD yang efisien dan efektif, hal ini memunculkan konsekuensi yang kukuh dalam kerangka transparansi, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola APBD (Fadhy, 2018)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD memiliki tiga komponen yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Unsur pembentuk dari pendapatan daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap struktur APBD ialah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (Rahmayati & Pertwi, 2018)

Dalam pengelolaan anggaran, tolak ukur kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan ialah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga PAD yang nilainya semakin besar dibandingkan pemberian dana yang telah diberikan pemerintah pusat maka pemerintah daerah mempunyai tingkat kemandirian keuangan atau fiskal yang tinggi, namun masih terdapat juga daerah yang bergantung pada transfer pemerintah pusat sehingga membutuhkan dana bantuan pusat yang disebut dana perimbangan (P. G. Putra & Ulupui, 2015)

Contoh dari daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat ialah Kabupaten Belu yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada di daerah perbatasan Timor Leste. Sebagai daerah perbatasan, isolasi fisik dari infrastruktur yang tersedia masih terbatas, dan isolasi sosial dari kerentanan sosial ekonomi masyarakat masih tinggi. Namun, otonomi yang diberikan tidak memandang Kabupaten Belu sebagai persiapan daerah

otonom yang mandiri dari pelaksanaan pendanaan dengan baik, hal ini terjadi jika ada dukungan pembangunan. Maka Dominasi keuangan daerah, pendapatan yang memadai dan dialokasikan tepat sejalan dengan pengeluaran sektor publik. Maka peningkatan pendapatan daerah dapat memungkinkan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang menggambarkan tentang kesejahteraan masyarakat (Bharanti, 2019) pemerintah daerah terhadap pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah masih sangat tinggi. Namun, upaya nyata pemerintah kabupaten Belu terus berinovasi untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Pelaksanaan pembangunan tergantung pada kapasitas kerja kabupaten Belu. Kemampuan bekerja ini tergantung pada bagaimana pemerintah kabupaten berupaya untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan sumber daya alam lainnya yang ada untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat untuk pembangunan daerah (Oki, Nalle, & Meomanu, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari & Rodiyah, 2017), menunjukkan bahwa setelah lima belas tahun desentralisasi fiskal, Kota Surabaya yang memiliki tingkat kemandirian fiskal daerah yang relatif tinggi. Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori rasio efisiensi anggaran daerah terburuk dengan rasio 0,87. Walaupun, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten dengan potensi ekonomi yang cukup besar di Jawa Timur, karena juga menjadi penyangga Kota Surabaya. Pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo masih belum bisa diandalkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah untuk pembangunan dan pelayanan ke masyarakat, sehingga dana perimbangan memiliki kedudukan yang penting dengan didominasi oleh dana alokasi umum. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dana perimbangan merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat atas pelaksanaan otonomi daerah dan bentuk dari perwujudan bahwa sistem otonomi daerah merupakan sistem yang diimplementasikan, akan tetapi tetap terletak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan dana perimbangan juga menjadi kekuasaan yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat berperan penting dalam alokasi dan distribusi belanja daerah (Wiraswasta, Pudjihardjo, & Adis, 2018)

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah memerlukan manusia yang berkualitas yang memiliki peran selaku modal dasar pembangunan. Maka, dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas, belanja daerah dialokasikan untuk memenuhi biaya dari adanya langkah-langkah sebagai upaya agar kualitas sumber daya manusia meningkat (Kusuma & Handayani, 2017)

Adanya desentralisasi fiskal dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah berjalan

berdampak adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah masih sangat tinggi. Namun, upaya nyata pemerintah kabupaten Belu terus berinovasi untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Pelaksanaan pembangunan tergantung pada kapasitas kerja kabupaten Belu. Kemampuan bekerja ini tergantung pada bagaimana pemerintah kabupaten berupaya untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan sumber daya alam lainnya yang ada untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat untuk pembangunan daerah (Oki, Nalle, & Meomanu, 2020)

Aspek yang mempengaruhi pembangunan pada suatu daerah adalah pengeluaran sektor publik dengan adanya kebijakan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah diharapkan kebijakan publik yang telah dirancang menjadi lebih baik terutama dalam pelayanan dan penyediaan dari adanya kebutuhan publik sehingga menjadi selaras dengan hal yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pemerintah daerah mampu melakukan perubahan dalam komposisi belanja yang dialokasikan untuk hal-hal yang lebih berguna yaitu terkait dengan menunjang program kepentingan publik salah satunya dengan alokasi belanja modal secara tepat (P. P. M. E. Putra & Dewi, 2018)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari adanya penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayati & Pertiwi, 2018) karena dari penelitian tersebut hanya menjelaskan hubungan langsung antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga ditambahkannya variabel intervening yaitu belanja modal. Penambahan variabel belanja modal ini karena berperan sebagai komponen belanja daerah, sehingga dapat diketahui komponen pendapatan daerah sebagai variabel independen yang dialokasikan melalui belanja modal mempengaruhi IPM atau tidak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bharanti, 2019) karena kinerja keuangan dan dana perimbangan digunakan sebagai variabel independen, sedangkan (P. P. M. E. Putra & Dewi, 2018) lokasi penelitiannya berada di tingkat provinsi yaitu Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memilih lokasi penelitian Kota Surabaya dikarenakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dan didukung terdapat laporan realisasi anggaran tahun 2010-2019 dengan kategori indeks pembangunan manusia yang berada di peringkat 3 besar dan pernah menjadi peringkat 1 dalam tingkat Jawa Timur didukung dengan memiliki kemandirian daerah yang tinggi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama 1 tahun anggaran (1 Januari-31 Desember) yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah yang sesuai dengan peraturan daerah. (Dewi, 2020)

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri sesuai dengan kemampuan daerah (Fadly, 2018)

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk menunjang pemerintah daerah dalam penerapan kewenangan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah (Elim dan Mamuka, 2014)

Belanja Modal

Belanja modal merupakan komponen belanja yang tersusun dalam anggaran pemerintah dan termasuk kategori belanja langsung yang menghasilkan output berupa aktiva tetap. Belanja Modal pada umumnya dialokasikan agar dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah, seperti dalam pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi, sehingga pembangunan daerah dapat dirasakan manfaatnya ke masyarakat (Sudika & Budiartha, 2017)

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator strategis yang menggambarkan tingkat pembangunan dan mengukur keberhasilan daerah atau negara dalam membangun kualitas atau mutu hidup manusia yang merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah, yang meliputi tiga dimensi dasar yaitu pendapatan, kesehatan, pendidikan/pengetahuan. (Badan Pusat Statistik, 2019)

Terdapat dua alasan utama perubahan metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertama, adanya indikator yang sudah tidak relevan dalam penghitungan IPM yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak menggambarkan kualitas pendidikan dan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita karena PDB dihitung dari seluruh faktor produksi dan adanya investasi asing yang turut diperhitungkan sehingga dianggap kurang tepat menggambarkan pendapatan masyarakat. Kedua, capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain dengan penggunaan rumus aritmatik sehingga memungkinkan terdapat transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke rendah.

Untuk melihat capaian indeks pembangunan manusia dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu: (Badan Pusat Statistik, 2019)

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. 0-59 (< 60) | : Rendah |
| 2. 60-70 | : Sedang |
| 3. 70-79 | : Tinggi |
| 4. $\geq 80-100$ | : Sangat Tinggi |

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya?
3. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal di Kota Surabaya?
4. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal di Kota Surabaya?

Penelitian ini memiliki 4 (empat) tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal di Kota Surabaya
4. Untuk mengetahui dan menganalisis dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal di Kota Surabaya.

2. Metodologi Penelitian

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah data Indeks Pembangunan Manusia dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

Penentuan jumlah sampelnya menggunakan metode *Purposive Sampling*. Sampel dari penelitian ini ialah data indeks pembangunan manusia dengan metode baru yang *United Nations Development Programme* (UNDP) resmikan pada tahun 2010 dan laporan realisasi anggaran di Kota Surabaya selama 10 Tahun dari Tahun 2010- 2019.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk laporan realisasi anggaran Kota Surabaya dan data Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya periode 2010-2019, diperoleh melalui website atau situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

2.3 Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data menggunakan program SPSS versi 25, dengan alat analisis regresi sebagai metode dalam analisis data.

Penelitian ini melakukan transformasi ke bentuk Logaritma natural (Ln), sehingga nilai satuan digunakan dapat menjadi sederhana tanpa mengubah proporsi dari nilai sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi dimana:

a. Model Persamaan Regresi I

$$\ln Z = \alpha + \beta \ln X_1 + \beta \ln X_2 + e$$

b. Model Persamaan Regresi II

$$\ln Y = \alpha + \beta \ln X_1 + \beta \ln X_2 + \beta \ln Z + e$$

Dimana:

- Ln : Logaritma natural
- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi
- X_1 : Pendapatan Asli Daerah
- X_2 : Dana Perimbangan
- Z : Belanja Modal
- Y : Indeks Pembangunan Manusia
- E : Error term

Untuk mengetahui adanya pengaruh secara tidak langsung dari variabel independen ke variabel dependen melalui variabel intervening, maka penelitian ini menggunakan uji sobel. Dalam menghitung nilai dari signifikansi variabel pengaruh intervening, dengan cara sebagai berikut:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2 + S_a^2 S_b^2}$$

Dimana:

S_{ab} = besar standart error pengaruh tidak langsung

S_a = standart error koefisien a

S_b = standart error koefisien b

a = jalur X dengan Z

b = jalur Z dengan Y

Dalam pengujian signifikansi pengaruh tidak langsung, perlu menguji nilai Z_{hitung} dengan rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Jika hasilnya untuk nilai dari $Z_{hitung} < Z_{tabel}$ dapat disimpulkan tidak terjadi pengaruh intervening sedangkan nilai $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ terjadi pengaruh intervening (Ghozali, 2018)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Uji F

1. Sub Struktur 1

Tabel 1. Uji F Persamaan Regresi 1

ANOVA ^a					
	Model	Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.724	2	.362	30.188 .000 ^b
	Residual	.084	7	.012	
	Total	.808	9		

a. Dependent Variable: \ln_Z

b. Predictors: (Constant), \ln_X_2 , \ln_X_1

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1, persamaan regresi 1 memiliki F tabel 4,74 dan F hitung 30,188 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$. Maka, membuktikan bahwa keseluruhan variabel independen (pendapatan asli daerah dan dana perimbangan) terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu belanja modal.

2. Sub Struktur 2

Tabel 2. Uji F Persamaan Regresi 2

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.004	3	.001	48.000	.000 ^b
	Residual	.000	6	.000		
	Total	.004	9			

a. Dependent Variable: \ln_Y

b. Predictors: (Constant), \ln_Z , \ln_X_1 , \ln_X_2

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2, persamaan regresi 2 memiliki F tabel 4,76 dan F hitung 48, sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$. Maka membuktikan bahwa keseluruhan variabel independen (pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia.

3.1.2 Koefisien Determinasi

1. Sub Struktur 1

Tabel 3. Koefisien Determinasi Persamaan Regresi 1

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.947 ^a	.896	.866	.10953

a. Predictors: (Constant), Ln_X2, Ln_X1

Sumber: data diolah,2021

Berdasarkan tabel 3, koefisien determinasi (R^2) dengan melihat kolom *R-Square* sebesar 0,896 sehingga menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mempengaruhi variabel belanja modal sebesar 89,6% dan 10,4% dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian.

2. Sub Struktur 2

Tabel 4. Koefisien Determinasi Persamaan Regresi 2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.980 ^a	.960	.940	.00542

a. Predictors: (Constant), Ln_Z, Ln_X1, Ln_X2

Sumber: data diolah,2021

Berdasarkan tabel 4, koefisien determinasi (R^2) dengan melihat kolom *R-Square* yaitu sebesar 0,960 sehingga menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal mempengaruhi variabel indeks pembangunan manusia sebesar 96 %, dan 4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

3.1.3 Uji T

1. Sub Struktur 1

Tabel 5. Uji T Persamaan Regresi 1

Coefficients^a					
Model	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
1 (Constant)	.448	3.920		.114	.912
Ln_X1	.299	.092	.475	3.254	.014
Ln_X2	.684	.167	.598	4.099	.005

a. Dependent Variable: Ln_Z

Sumber: data diolah,2021

Berdasarkan tabel 5, nilai t hitung variabel pendapatan asli daerah sebesar 3,254 dan t tabel 1,89, sehingga t hitung > t tabel. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Surabaya tahun 2010 –2019.

Nilai t hitung variabel dana perimbangan sebesar 4,099 dan t tabel 1,89, sehingga t hitung > t

tabel. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Surabaya tahun 2010 –2019.

2. Sub Struktur 2

Tabel 6. Uji T Persamaan Regresi 2

Dependent Variable: Ln_Y

Model	Coefficients^a			t	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	
(Constant)	2.450	.194		12.627	.000
Ln_X1	.028	.007	.596	3.844	.009
Ln_X2	.028	.015	.332	1.840	.115
Ln_Z	.012	.019	.164	.646	.542

Sumber: data diolah,2021

Berdasarkan tabel 6, nilai t hitung variabel pendapatan asli daerah sebesar 3,884 dan t tabel sebesar 1,94 sehingga sehingga t hitung > t tabel. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya tahun 2010 –2019.

Nilai t hitung variabel dana perimbangan sebesar 1,840 dan t tabel 1,94, sehingga t hitung < t tabel. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya tahun 2010 –2019.

Nilai t hitung variabel belanja modal sebesar 0,646 dan t tabel sebesar 1,94, sehingga t hitung < t tabel. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya tahun 2010 –2019.

3.1.4 Uji Sobel

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal

Sab=

$$\sqrt{0,012^2 0,092^2 + 0,299^2 0,007^2 + 0,092^2 0,007^2} = 0,002452$$

$$Z = \frac{0,003588}{0,002452} = 1,4632$$

Berdasarkan penghitungan tersebut menunjukkan bahwa z hitung sebesar 1,4632, sehingga z hitung < z tabel sebesar 1,96 dengan koefisien intervening sebesar 0,003588 maka pendapatan asli daerah tidak

berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal.

2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal

$$\text{Sab} = \frac{\sqrt{0,012^2 0,167^2 + 0,684^2 0,015^2 + 0,167^2 0,015^2}}{0,0107}$$

$$Z = \frac{0,008208}{0,0107} = 0,7671$$

Berdasarkan penghitungan tersebut menunjukkan z_{hitung} sebesar 0,7671 sehingga $z_{\text{hitung}} < z_{\text{tabel}}$ sebesar 1,96 dengan koefisien intervening sebesar 0,008208 maka dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Surabaya

Berlandaskan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai t_{hitung} sebesar $3,884 > t_{\text{tabel}}$ sebesar 1,94 dan memiliki hubungan positif sebesar 0,028, maka menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya tahun 2010 –2019 sehingga setiap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan berdampak terhadap meningkatnya indeks pembangunan manusia. Maka, pemerintah diharapkan fokus di dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. sehingga indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh (Rahmayati & Pertiwi, 2018) dan (Rinanda & Subambang, 2020) namun bertentangan dengan penelitian (Fadly, 2018) yang menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

3.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Surabaya

Berlandaskan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa dana perimbangan mempunyai t_{hitung} sebesar $1,840 > t_{\text{tabel}}$ sebesar 1,94, maka menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak mempunyai pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya tahun 2010 –2019. Dana perimbangan yang tidak mempunyai pengaruh secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia menunjukkan bahwa adanya anggaran yang digunakan belum mampu untuk

meningkatkan komponen kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh (Rahmayati & Pertiwi, 2018) dan (P. P. M. E. Putra & Dewi, 2018) namun bertentangan dengan penelitian (Bharanti, 2019) yang menyebutkan bahwa dana perimbangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal di Kota Surabaya

Berlandaskan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan positif sebesar 0,003588 namun z_{hitung} sebesar $1,4632 < z_{\text{tabel}}$ sebesar 1,96 sehingga PAD tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui belanja modal. Artinya walaupun PAD berpengaruh langsung terhadap belanja modal dan IPM namun belanja modal tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap IPM sehingga PAD tidak mempunyai pengaruh terhadap IPM melalui belanja modal di Kota Surabaya tahun 2010-2019.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh (Rinanda & Subambang, 2020) namun bertentangan dengan penelitian (P. P. M. E. Putra & Dewi, 2018) yang menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal.

3.2.4 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal di Kota Surabaya

Berlandaskan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki hubungan positif sebesar 0,008208 namun z_{hitung} sebesar $0,7671 < z_{\text{tabel}}$ sebesar 1,96, sehingga dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui belanja modal. Artinya dana perimbangan hanya berpengaruh langsung terhadap belanja modal namun tidak mempunyai pengaruh terhadap IPM didukung dengan belanja modal juga tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap IPM sehingga dana perimbangan tidak mempunyai pengaruh terhadap IPM melalui belanja modal di Kota Surabaya tahun 2010-2019.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh (Bharanti, 2019) namun bertentangan dengan penelitian (P. P. M. E. Putra & Dewi, 2018) yang menyebutkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal.

4. Kesimpulan

Menurut hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, sehingga bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya tahun 2010 –2019.
2. Dana perimbangan tidak mempengaruhi secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya tahun 2010 –2019.
3. Pendapatan asli daerah melalui belanja modal tidak memiliki hubungan secara tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya tahun 2010 –2019
4. Dana perimbangan melalui belanja modal tidak memiliki hubungan secara tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya tahun 2010 –2019

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hal yang bisa ditindaklanjuti:

1. Peneliti yang tertarik melakukan penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan memakai waktu penelitian sebelum dan sesudah diresmikannya metode baru dalam menghitung IPM agar dapat mengetahui perbedaan penerapan metode lama dan baru dan diharapkan juga adanya penambahan variabel jumlah penduduk sebagai variabel independen untuk menggambarkan kuantitas penduduk sehingga bisa diketahui juga hubungan antara kuantitas dan kualitas masyarakat.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan mempelajari terkait variabel intervening yang berperan sebagai komponen belanja daerah untuk mengganti variabel belanja modal.

Daftar Rujukan

- [1] Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia 2018*.
- [2] Bharanti, B. E. (2019). The Effect of Fiscal Balance Transfer, Financial Performance on Capital Expenditure Impacting on The Human Development Index of Papua Province. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 4(3), 157–183.
- [3] Dewi, A. K. (2020). Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 153–162. <https://doi.org/10.20473/baki.v5i2.18332>
- [4] Elim, I., & Mamuka, V. (2014). Analisis Dana Transfer Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 646–655. <https://doi.org/10.35794/emb.v2i1.4379>
- [5] Fadly, Z. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–15.
- [6] Ghazali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (ke-9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. In (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [7] Kustianingsih, N., Muslimin, & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6), 82–91.
- [8] Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 404–420.
- [9] Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Ekopem: Jurnal Ekonomi* ..., 5(2), 1–6. Retrieved from <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/584>
- [10] Oktafia, A. M., Soelistyo, A., & Arifin, Z. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 53–62.
- [11] Purnamasari, D., & Rodiyah, I. (2017). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 – 2014. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(1), 75–92.
- [12] Putra, P. G., & Ulupui, P. I. G. K. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(3), 863–877.
- [13] Putra, P. P. M. E., & Dewi, M. H. U. (2018). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7(10), 2163–2189.
- [14] Rahmayati, A., & Pertwi, I. F. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1), 45–62. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1149>
- [15] Rinanda, T., & Subambang. (2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) Melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten / Kota Prov. *Jurnal Ekonomi Hukum & Humaniora*, 1(1), 18–36.
- [16] Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 1(1), 1–17. Retrieved from <http://jea.ppp.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/52/24>
- [17] Sudika, I, Komang, & Budiartha, I ketut. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1689–1718.
- [18] Utami, D. N., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh Pad Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(10), 2195–2225.
- [19] Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M., & Adis, P. M. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 170–180. <https://doi.org/10.26905/jbm.v5i2.2390>